

Ulama Dan Politik Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Sosiologi

¹Randi, ¹Yulasteriyani, ²Junaidi

¹Dosen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya

²Dosen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

Email: randi@fisip.unsri.ac.id

Abstrak. Kehadiran ulama dalam dunia perpolitikan sudah menjadi hal yang tidak tabu lagi. Banyak dan terlihat jelas bahwa berperan dan ikut serta dalam politik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ulama ikut serta dalam dunia perpolitikan serta terdapat beberapa kepentingan didalamnya yang memicu ikut sertanya ulama dalam politik. Ulama dan politik adalah dua konsep yang berbeda dimana ulama sebagai aktor dan politik adalah arena. Menurut hasil tulisan ini bahwa ulama dan politik tidaklah dapat dilepaskan dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Pada dasarnya agama adalah untuk kedamaian di dunia. Niat ingin mencapai tujuan namun politik tidak semurni yang diharapkan sehingga banyak ulama yang terlibat dalam kriminalisasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa pertemuan antara pemerintah dan ulama, hal ini terkait persoalan penegakan hukum, kebangsaan hingga keadilan, dugaan praktik kriminalisasi yang dialami sejumlah ulama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literatur.

Kata Kunci : *Ulama, Politik, Kesejahteraan, Agama, Islam*

Abstrack. *The presence of ulama in the world of politics has become something that is not taboo anymore. Many and it is clear that participating and participating in politics. There are several factors that influence the clergy to participate in politics and there are several interests in it that trigger the participation of scholars in politics. Ulama and politics are two different concepts where clerics as actors and politics are arenas. According to the results of this paper that scholars and politics cannot be released with the aim of creating a better life. Basically religion is for peace in the world. The intention of wanting to achieve the goal but politics is not as pure as expected so many scholars are involved in criminalization. This is evidenced by the existence of several complaints between the government and ulama, this is related to the issue of law enforcement, nationality to justice, alleged criminalization practices experienced by a number of scholars. This study uses quality method with literature study data collection technique.*

Keywords: *Ulama, Politics, welfare, Religion, Islam*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya beragama muslim, mulai dari sabang sampai merauke. Pemerintah yang kuat pun sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar dan Pancasila dan telah di gariskan Allah. Banyak para ulama yang turun ke dunia politik, dengan tujuan agar masyarakat tidak terjerumus dalam kekacauan dan dosa, serta menjadikan pemimpin atau

penguasa yang taat beragama dan kerukunan umat. Dalam hal ini, ulama yang ikut berperan dalam dunia politik sebenarnya adalah hal yang benar, namun tidak sepenuhnya benar, namun tidak pula di salahkan. Maksudnya peran ulama dalam dunia politik sepenuhnya tidak sebaiknya di tangan mereka, karena dalam hal ini untuk menyatukan agama dan politik sangatlah bertabrakan, namun bukan bearti agama tidak dapat masuk ke dalam politik, agama bisa ikut turun ke politik namun dengan batas yang ia

punya, seperti dengan tugasnya agama untuk menyalarkan suatu tindakan, atau menyalarkan adanya program yang akan dibuat oleh pemerintah. Ini sangat penting, karena peran seperti ini sangat di butuhkan oleh pemerintah, adanya peresmian peredaran barang konsumsi dari luar negeri atau import seperti makanan yang harus mendapatkan label halal terlebih dahulu dari MUI. Melihat dinamika politik ulama sangat menarik hal yang umum terjadi menurut FAridl, 2007 ada dua pilihan model, yaitu: Pertama, model yang memilih diam ketika menghadapi berbagai perubahan sosial politik. Kedua, model yang cepat tanggap terhadap berbagai perubahan sosial politik yang terjadi. Sikap ulama konsisten dengan ideology politik keagamaan dan berjhati-hati dalam bertindak untuk kemaslahatan dan menjauhi mafsadah (Fealy, 2012). Ulama bergerak melalui gerakan bawah tanah (underground) yang biasa memebrikan pesan tersirat untuk memelih pemimpin tersebut. Ulam juga bergerak terang terangan melalau partai (Nahdli, 2015).

Jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya peran ulama penting namun dengan porsinya tidak sepenuhnya dipegang oleh ulama, karena negara kita sendiri adalah negara yang demokratis, walaupun setengah warganya adalah mayoritas muslim, tetapi setengahnya adalah beberapa agama yang lain. Dan lebih tepatnya perlunya kita untuk membagi porsi yang rata bagi yang lainnya, jangan hanya karena Indonesia mayoritas muslim lalu dengan gampangya berniat untuk meratakan politik di ambil alih oleh ulama muslim, ini merupakan hal yang tidak tepat. Sering kali telah terbukti, bagaimana susahya bagi pemerintah negeri menjalankan satu urusan, bilamana tidak disetujui oleh alim-ulama di daerah yang bersangkutan. Sebaliknya pun begitu pula. Beruntunglah salah satu masyarakat, bila mempunyai seorang alim, sebagai pemimpin rohani yang tahu dan insaf akan tanggungannya sebagai penganjur dan penunjuk jalan.

Aman dan makmurlah salah satu daerah bilamana pegawai-pegawai pemerintah di situ

tahu menghargakan kedudukan alim ulama yang ada di daerah itu.” Alangkah baiknya pembagian porsi yang merata, dengan batas yang wajar. Sehingga, Indonesia beserta masyarakatnya pun merasakan kedamaian, ketentraman, serta merasa adil sebagai umat beragama dan warga yang bangga dengan mengikat ikrar Bhinneka Tunggal Ika nya dengan sebenar-benarnya. Terdapat dua faktor di dalamnya mengenai alasannya. Menarik sekali ketika berbicara terkait ulama dan politik, maka kali ini penulis ini membahas terkait keterlibatan ulama dalam politik. Mengingat beberapa kasus yang menyeret para ulama ke politik bahkan ke meja hijau.

METODE

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data penelitian adalah data sekunder. Berikut sumber data sekunder dokumen, arsip, surat-surat, buku, yang berkaitan langsung dengan ulama dan politik. Studi pustaka yang dilakukan selama 1 semester. Data didapat dari berbagai sumber bacaan dengan berbagai kategori: sumber referensi umum, buku ajar, buku bacaan, artikel lepas, e-jurnal dan laporan hasil penelitian. Kemudian teknik pengumpulan data dalam tulisan ini yaitu dengan studi literatur.

PEMBAHASAN

Kajian Sosiologi

Keterlibatan ulama dalam dunia politik baik langsung maupun tidak langsung harus diniati atau dimotivasi untuk menciptakan keadilan sosial, kemaslahatan umat, dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk memenuhi ambisi politik kekuasaan pribadi maupun untuk membantu mengembangbiakan idiolog dan ormas keagamaan tertentu (bolong, 2018).

Mudzhar (2000) menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, Pertama terkait dengan tema agama dan perubahan masyarakat, dimana Emile Durkheim yang berusaha menganalisis dan mengenalkan konsep fungsi sosial agama di

tengah-tengah masyarakat. Kedua, membahas terkait dengan struktur dan perubahan masyarakat yang berpengaruh terhadap ajaran agama atau konsep keagamaan di masyarakat. Ketiga, melihat amalan beragama masyarakat. Keempat, melihat pola sosial masyarakat muslim. Kelima, pada bagian ini melihat masyarakat sebagai suatu gerakan yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama di masyarakat.

Secara sosiologis, kesadaran umat Islam atau masyarakat akan posisi strategis para ulama dalam mempersatukan NKRI dianggap mulai membaik hal ini dapat dilihat dari etiap aktivitas ulama yang dikabarkan oleh beberapa media. Sehingga tidak jarang ada gerakan politik oleh ulama di tengah-tengah kehidupan umat isal dan agama lainnya. Ulama adalah orang yang paham agama, sebagai seorang yang mampu memperbaiki akhlak umat melalui pengetahuan agama yang dimiliki. Seperti yang diungkapkan dalam hadist HR. Ahmad, sebagai berikut:

“Permisalan ulama di muka bumi seperti bintang yang ada di langit. Bintang dapat memberi petunjuk pada orang yang berada di gelap malam di daratan maupun di lautan. Jika bintang tak muncul, manusia tak mendapatkan petunjuk.” (HR. Ahmad).

sabda baginda Nabi di atas menunjukkan betapa kedudukan ilmu dan ulama begitu *urgen* bagi kaum muslimin, bahkan seluruh manusia. Peran mereka adalah menjaga umat dari kebodohan yang mengakibatkan maksiat dan kerusakan di muka bumi. Sekarang telah tampak kerusakan di muka bumi hingga banyak ulama yang tampak terlibat dalam politik. Tugas dan misi manusia di muka bumi yaitu bertumpu kepada pandangan dan serta asumsi yang mendasar terkait dengan manusia. Manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki keimanan dan hakikat tujuan manusia di dunia berhubungan dengan Tuhan. Anggapan Yahudi, Nasrani dan Islam, memiliki konsep yang berbeda terkait dengan misi dan fungsi manusia. Sudut pandang yang berbeda tersebut tergantung pada

masing-masing wahyu agama memandang manusia. Sehingga konsep ulama menurut agama dan orang Nasrani, Yahudi, Kristen, dan Islam sebagai implikasi hakikat peran manusia satu dengan lainnya berbeda. Istilah ulama dalam islam merupakan sebutan yang khusus diberikan untuk agamawan atau seorang yang paham agama. Sedangkan etika politik Islam, politik dipahami sebagai seperangkat aturan atau norma dalam bernegara di mana setiap individu dituntut untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan Allah sebagaimana tercantum dalam al-Qur’an. Nilai-nilai etika politik tersebut merujuk kepadapola kehidupan Nabi Muhammad SAW, baik dalam kehidupan secara umum maupun secara khusus dalam tatanan politik kenegaraan. Sedangkan dalam paham kristiani, etika politik dipahami sebagai usaha untuk mencapai kesejahteraan umum masyarakat, bukan hanya kesejahteraan golongan atau individu.

Kesejahteraan umum adalah keseluruhan kondisi hidup mencapai kesempurnaan serta sasaran-sasaran yang telah ditetapkan masyarkat sehingga mereka akan disanggupkan untuk lebih muda dan lebih penuh mencapai kesempurnaan. Dalam ajaran gereja, kesejahteraan umum dipahami sebagai nilai pelayanan. Kesejahteraan umum terwujud dalam nilai kebaikan yang diejawantahkan dalam kehidupan masyarakat, dengan demikian masyarakat akan lebih mudah dan lebih penuh menggapai kesempurnaan. Etika politik kristiani melihat kesejahteraan umum bukanlah tujuan dalam dirinya sendiri. Dia ada demi melayani keperibadian manusia serta rencana penciptaan dan keselamatan Allah. Hal ini menyiratkan bahwa keperibadian manusia tidak semata-mata menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan umum serta sasaran-sasaran masyarakat. Ia secara langsung bertanggung jawab kepada Allah. Kesejahteraan umum suatu masyarakat berkaitan dengan tugas dasar serta sasaran esistensial manusia, maka semakin berat pula kewajiban untuk memajukannya. Kewajiban ini dikenakan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam

kehidupan masyarakat. Daya ikat dan kekuatan yang mewajibkan dari kesejahteraan umum lebih berat dalam satu negara dari pada dalam satu keluarga. Untuk mewujudkan etika politik dibutuhkan persetujuan masyarakat karena menyangkut tindakan kolektif.

Dalam keterlibatan pada dunia politik para ulama atau agamawan hendaknya melakukan pendekatan dengan sikap etis. Artinya memandang dan memperlakukan semua orang yang terlibat dalam politik sebagai sesama manusia dan warga negara yang sejajar dan mengambil keputusan secara adil. Tolak ukur adalah kesejahteraan umum dalam prosedur demokrasi. Para ulama berjuang meningkatkan kesadaran diri dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum harus ditumbuhkan, sehingga dapat meningkatkan mutu hidup manusia bersama. Hukum harus diyakini sebagai perlindungan bagi rakyat untuk memperoleh keadilan.

Tiap agama memiliki pandangan berbeda tentang keterlibatan ulama atau pemimpin agama dalam dunia politik. Syarat keterlibatan itu tidak hanya dibentuk dalam satu kesepakatan lisan, melainkan tercantum dalam konstitusi agama yang bersangkutan. Setiap pemuka agama atau ulama wajib mengikuti peraturan yang sudah menjadi pegangan umum dari institusi agama masing-masing. Dalam Islam, sejak awal perkembangannya teologi Islam berkaitan erat dengan politik. Hal ini antara lain disebabkan Nabi Muhammad pada hampir sepuluh tahun terakhir masa hidupnya memimpin umat yang mempunyai ciri-ciri sebuah negara. Perumusan ajaran keagamaan Islam akhirnya terjadi dalam konteks kehidupan yang tidak lepas dari pergumulan politik. Anggapan atau keyakinan keagamaan bahwa Islam adalah dinwadaulah (agama dan negara) merupakan konsekwensi dari perkembangan itu. Dalam keadaan ini agama dan penyelenggara negara menyatu dan saling memasuki. Dalam Alquran sangat lugas membicarakan masalah politik dan duniawi. Dari lebih 6000 ayat yang terdapat dalam Alquran hanya sekitar 600 saja yang

membicarakan masalah-masalah keagamaan dan urusan akhirat. Sedangkan yang selebihnya berkaitan dengan masalah politik dan urusan duniawi. Dengan demikian Islam merupakan suatu sistem kehidupan manusia yang komprehensif.

Islam bukan semata-mata merupakan agama yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Sebaliknya Islam adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan dalam segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan politik dan negara. Islam agama yang sangat lengkap, di dalamnya terdapat pula tentang sistem ketatanegaraan dan politik. Karena ajaran Islam menekankan juga masalah politik maka semua kaum muslimin baik pemuka agama maupun umat kebanyakan, mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan politik. Tidak ada siapapun boleh melarang atau membatasi seorang muslim yang hendak mengabdikan diri untuk kehidupan masyarakat melalui dunia politik. Dalam kegiatan politik, setiap kaum muslimin menjalankan politik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Kriteria secara khusus diberikan kepada para ulama atau agamawan jika mereka hendak melibatkan diri dalam dunia politik. Ulama membangun sebuah nilai moral serta tatanan masyarakat baru yang berdasarkan pada firman Tuhan yaitu Alqur'an. Dari sana kemerdekaan manusia diperjuangkan, kebudayaan dibangun, disiplin masyarakat diberdayakan, hak-hak dan martabat perempuan dipulihkan kembali. Tatanan baru ini merupakan perwujudan dan pesan profetik Muhammad yang mengilhami berbagai macam ragam upaya dari banyak orang untuk mendukung gerakan-gerakan pembebasan dan pemuliaan harkat dan martabat manusia dalam segenap bidang kehidupan yang menyangkut relasi-relasi politik dalam masyarakat.

Dalam hal ini, salah satu bentuk bahwa ulama ikut dalam dunia politik, yaitu adanya salah satu calon wakil presiden tahun 2019 ini adalah seorang tokoh ulama yaitu K.H. Ma'ruf

Amin. Dikatakan bahwa akan menjadi salah satu calon presiden nantinya. Dengan adanya beliau menjadi calon presiden Indonesia nantinya, dapat dilihat bahwa pengaruh serta minat ulama terhadap politik semakin tinggi saja. Seperti dalam visi misi yang ia berikan, “ Dalam bidang kesehatan, kami pastikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan berlanjut. Begitu juga Program Keluarga Harapan (PKH). Di pendidikan, beasiswa akan kita teruskan dan tingkatkan sampai kuliah. Oleh karena itu, kepada anak-anakku semua, saya nyatakan, kalian jangan takut untuk bermimpi, bercita-cita. Orang tua tidak perlu khawatir akan masa depan anaknya. Kalian jangan takut dan sedih karena sekarang negara telah hadir dan akan terus hadir membantu kalian.” Tidak terdapat dalam visi misinya berasumsi tentang agama dan lainnya, ia lebih menitik beratkan untuk kepentingan bersama dalam hal membantu masyarakatnya.

Lain halnya dalam pemilihan umum Bupati Banyuwangi tahun 2018 lalu, salah satu calon dalam pemilihan umum Bupati Banyuwangi kemarin adalah seorang ulama yang serta pemilik salah satu pondok pesantren di Sumatera Selatan yaitu K.H Buya Husni Thamrin. Dengan kebijakan tanpa seleksi bagi anak yang ingin masuk pondok, merupakan salah satu kebijakan yang akan ia laksanakan apabila ia menang dalam pemilu Bupati Banyuwangi 2018 ini. Dari penjelasan yang telah di sampaikan, bahwa benar adanya bahwa politik sudah dimasuki oleh para tokoh agama atau ulama dan makin terlihat jelas tampaknya, dan bukan hanya ingin sebagai penyelaras saja tetapi sebagai tokoh yang memimpin daerah. Dengan visi misi yang mereka bawa untuk menjadikan mereka pemenang dalam pemilu.

Pertama, faktor posisi seorang ulama yang menurut studi-studi terdahulu memperlihatkan adanya perubahan masyarakat perubahan ini tentunya terjadi dalam sosial, ekonomi, politik dan budaya. Berikut studi yang dilakukan Horikoshi (1978), menunjukkan kekuatan kyai sebagai sumber perubahan sosial, bukan saja pada masyarakat pesantren tapi juga pada

masyarakat di sekitarnya, hal inilah yang menjadi ulama cukup di pandang oleh masyarakat. Sementara Geertz (1960) melihat kyai sebagai makelar budaya (*cultural brokers*) dan menyatakan bahwa pengaruh kyai terletak pada pelaksanaan fungsi makelar ini. Secara politis kyai atau ulama ini di pandang sebagai sosok yang belum memiliki pengalaman dan kemampuan profesional dalam bidang politik, namun secara sosial masyarakat dan agama terbukti mampu memberikan jalan atas kepentingan.

Kedua, faktor kekuatan personal yang diwarnai oleh pemikiran teologis yang menjadi dasar perilaku yang diperankannya. Ulama dipandang sebagai seorang yang memiliki karismatik di tengah-tengah masyarakat sehingga ulama ini dianggap memiliki kemampuan untuk menggerakkan masyarakat dalam menentukan pilihan politik. Namun, lain halnya yang di katakan oleh Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Dr. Ahmad Zain An Najah mengatakan politik yang tidak mendekati ulama maka akan menjadi politik yang rusak. Sebaliknya apabila politik yang meminta arahan ulama maka akan lahir politik yang baik dan santun.

Menurutnya ilmu politik adalah ilmu mengatur negara. Sebab segala sesuatu diperlukan ilmu. Umar bin Khattab pernah mengatakan belajarlah sebelum kalian memimpin. Adapun sumber ilmu adalah melalui ulama. Ia menjelaskan keterlibatan ulama dalam politik ada dua, meski idealnya ulama tidak masuk ke dalam politik praktis. Pertama, ulama semestinya berada di atas politisi, yang tidak diatur oleh atasan atau menjadi wakil. Model ke dua, ulama boleh masuk ke dunia politik praktis tetapi harus menjadi pemimpin bukan menjadi bawahan. Sehingga ulama harus menjaga keidealannya dalam menjadi rujukan penguasa. Ulama harus mengarahkan, bukan justru diarahkan oleh penguasa. Sebab tidak ada contoh nabi menduduki jabatan sebagai wakil atau bawahan, kecuali pemimpinnya adalah nabi.

Dr. Zain melanjutkan sejatinya umat Islam ini bisa memenangkan pertarungan antara hak dan batil tanpa perang. Salah satunya melalui politik ulama yakni politik dakwah. Ulama harus menjadi hakim para politisi, yang mengarahkan atau menegur politisi yang melakukan kekeliruan.

Sejatinya alur politik ulama adalah menegakkan keadilan. Baik ulama menjadi penguasa atau mengarahkan penguasa untuk menegakkan keadilan. Ia menyampaikan keutamaan ulama banyak disebutkan dalam kitab Al Quran. Salah satunya dalam QS. An Nisa ayat (59), perintah untuk taat kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri. Ahli Tafsir sepakat Ulil Amri dalam ayat tersebut bermakna ulama. Ia menambahkan, sebab ulama mengikuti perintah Allah dan Rasul. Adapun makna ulil amri, pemimpin ialah pemimpin yang taat pada ulama.

KESIMPULAN

Dalam keterlibatan pada dunia politik para ulama atau agamawan hendaknya melakukan pendekatan dengan sikap etis. Artinya memandang dan memperlakukan semua orang yang terlibat dalam politik sebagai sesama manusia dan warga negara yang sejajar dan mengambil keputusan secara adil. Islam bukan semata-mata merupakan agama yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Sebaliknya Islam adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan dalam segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan politik dan negara. Islam agama yang sangat lengkap, di dalamnya terdapat pula tentang sistem ketatanegaraan dan politik. Karena ajaran Islam menekankan juga masalah politik maka semua kaum muslimin baik pemuka agama maupun umat kebanyakan, mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan politik.

Dengan banyak perdebatan yang mengenai masuknya peran ulama di dalam politik, ada yang menyetujui mengenai masuknya para ulama. Namun, terdapat juga beberapa diantaranya yang tidak menyetujui masuknya

ulama ke dunia perpolitikan. Namun, balik lagi bahwa para ulama tetaplah ulama, ia sebagai pembimbing, pencerahan bagi umatnya dengan tujuan awalnya sebagai menelaras untuk yang salah dan membimbing ke jalan yang benar sesuai ajaran agama yang ia teguhkan. Apabila ia mampu bersifat netral dalam berbagai sudut pandang agama lainnya, kemungkinan para ulama dapat menjadi sosok pemimpin daerah untuk masyarakatnya dengan baik. Karena balik lagi bahwa Indonesia sendiri merupakan negara yang kaya, bukan hanya kaya sumber daya, namun berbagai macam juga etnis, ras, budaya, serta agama. Oleh karena itu, bila ia mampu menyatukan semuanya dengan bijaksana tanpa adanya kesenjangan dan saling merasakan kesetaraan maka itu adalah hal yang baik untuk ulama sendiri dan masyarakat Indonesia pula. Kedudukan ilmu dan ulama begitu *urgen* bagi kaum muslimin, bahkan seluruh manusia. Peran mereka adalah menjaga umat dari kebodohan yang mengakibatkan maksiat dan kerusakan di muka bumi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bolong, Bertolomes. 2018. *Etika Politik Ulama*. Millah. 18 (1): 129-152.
- Faridl, Miftah. 2007. *Peran Sosial Politik Kyai di Indonesia*. Journals ITB. 11: 238-243.
- Fealy, Greg. 2012. *Ijtihad Politik Ulama ; Sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta: LKisYogyakarta.https://books.google.co.id/books?printsec=frontcover&vid=ISBN9789793381008&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Geertz, Clifford. 1960. *The Religion of Java*. London: The University of Chicago Press.
- Horikoshi, Hiroko. *A Traditional Leader in a Time of Change: The Kijaji and Ulama in West Java*. USA: The University of Illinois at Urbana-Champaign, 1976.
- Mudzhar, M. Atho'. "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam", dalam Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan. Ed. M. Amin

Abdullah. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000).

Nahdli, Akbar F. M. 2015. *Keterlibatan ulama dalam politik*: repository.